

Gaya Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo dalam Menyikapi Isu-Isu Kebijakan Publik Melalui Media Massa

Oleh :

M.Y Tiyas Tinov, Baskoro Wicaksono

Abstract

Every president has a different style of political communication between another. Typology political communication style that uses high political communication context and low context of political communication. President SBY is one president who uses high-context communication while President Jokowi using low context communication, in which the language used is easy to understand, straightforward and not winged so as to avoid different interpretations. President Jokowi communication style in addressing issues of public policy in the mass media is not different when conducting a press conference, the "main shoot straight". Similarly, ministers, causing a political uproar because not coherent between the president and his aides. This study contains the formulation of the problem as follows; First, what are the public policy issues are addressed by the President Joko Widodo in the mass media. Secondly, how political communication styles President Joko Widodo in addressing public issues through the mass media? This study used a qualitative approach and type of penelitin descriptive research strategy research library. Data retrieval technique using 1 (one) way, the documentation of the various mass media, both print and online. This study shows there are 2 (two) typology distribution policy issues regarding the administration of President Jokowi, namely (a) issues into tranding topic in the online media and social media, (b) issues popular in audience the general public as much 12 (twelve) policy issues. Furthermore, political communication Jokowi not managed properly, often a difference between the president and his aides. Therefore Jokowi form of political communication team in charge of providing information to the public. Political communication style is low context cultures adjust communication society because it is influenced by tradition and Mataraman Culture.

Keywords: Political Communication, Policy Issues, Mass Media

Abstrak

Setiap Presiden mempunyai gaya komunikasi politik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gaya komunikasi politik ada yang menggunakan komunikasi politik *high context* dan komunikasi politik *low context*. Presiden SBY adalah salah satu Presiden yang menggunakan *high context communication* sedangkan Presiden Jokowi menggunakan *low context communication*, dimana bahasa yang digunakan mudah dimengerti, lugas dan tidak bersayap sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berlainan. Gaya komunikasi Presiden Jokowi dalam menyikapi isu-isu kebijakan publik di media massa tidak berbeda ketika melakukan konferensi pers, yakni "main tembak langsung". Demikian pula para menterinya sehingga terjadi kegaduhan politik karena tidak koheren antara Presiden dengan para pembantunya. Studi ini

memuat rumusan masalah sebagai berikut; *Pertama*, apa saja isu-isu kebijakan publik yang disikapi oleh Presiden Joko Widodo dalam media massa. *Kedua*, bagaimana gaya komunikasi politik Presiden Joko Widodo dalam menyikapi isu-isu publik melalui media massa ? Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitan deskriptif dengan strategi penelitian *library research*. Teknik pengambilan data menggunakan 1 (satu) jalan, yakni dokumentasi dari pelbagai media massa baik cetak maupun online. Hasil studi memperlihatkan ada 2 (dua) tipologi sebaran isu-isu kebijakan mengenai pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu (a) isu-isu yang menjadi *tranding topic* di media online dan sosial media, (b) isu-isu yang populer di khalayak masyarakat umum sebanyak 12 (dua belas) isu kebijakan. Selanjutnya komunikasi politik Jokowi tidak terkelola dengan baik, seringkali terjadi perbedaan antara Presiden dengan pembantunya. Oleh karena itu Jokowi membentuk tim komunikasi politik yang bertugas memberikan informasi kepada publik. Gaya komunikasi politiknya bersifat *low context communication* menyesuaikan kultur budaya masyarakat karena dipengaruhi oleh tradisi dan budaya mataraman.

Kata kunci: Komunikasi politik, Isu Kebijakan, Media Massa

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Pasca Reformasi dipimpin oleh 5 (lima) Presiden, yaitu BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo. Setiap Presiden mempunyai pola komunikasi politik yang berbeda secara khas dalam menyikapi isu-isu kebijakan publik. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan masing-masing Presiden. Komunikasi Politik secara garis besar diartikan penyampaian pesan politik dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan oleh penyampai pesan.

Menurut Efendi Ghazali, komunikasi politik tidak sekedar berkomunikasi melainkan juga menyampaikan substansi pelbagai hal yang disampaikan kepada khalayak oleh Presiden Indonesia seringkali tidak jelas intisarnya (digilib.mercubuana.ac.id).

Indonesia tidak terlepas dari konteks kebudayaan, demikian pula dengan penggunaan komunikasi politik. Dilihat dari segi kebudayaan, manusia secara global dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yakni kebudayaan konteks tinggi (*high context culture*) dan kebudayaan konteks rendah (*low context culture*). (Hall dalam Tjipta Lesmana:2012:xx). Komunikasi dikatakan tinggi apabila menggunakan kata-kata bersayap, menggunakan bahasa tubuh yang tidak jelas dan bahasa verbal tidak langsung ke intisari. Sedangkan komunikasi rendah, komunikan mudah memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Presiden yang menggunakan komunikasi konteks tinggi yaitu Suharto. Salah satu contoh, Presiden Suharto menasehati jajaran pers nasional agar mereka senantiasa memberikan informasi yang benar, sekaligus informasi yang mendukung pembangunan. Komunikasi tersebut multi tafsir bagi elite politik dan khalayak masyarakat.

Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo juga senang menggunakan komunikasi konteks tinggi ketika menyikapi kisruh KPK-POLRI sejak Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dan Bambang Widjayanto ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar

POLRI (BARESKRIM MABES POLRI). Beliau dalam konferensi pers mengatakan kita dukung pemberantasan korupsi dan tidak ada usaha pelemahan KPK (disadur dari pelbagai media massa).

Sebaliknya contoh komunikasi tingkat rendah, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan pemberantasan *illegal fishing*. Statemen Presiden dalam salah satu acara seminar dan konnferensi pers di Istana Negara adalah “kita selamatkan laut kita, tangkap nelayan-nelayan asing dan ilegal, tenggelamkan kapalnya” (disadur dari pelbagai media massa). Ungkapan tersebut jelas maknanya untuk mengurangi pencurian hasil laut dengan tegas menenggelamkan kapal-kapal nelayan diatas 1000 tonase.

Isu-isu kebijakan publik di atas diberitakan oleh media massa Riau Pos edisi bulan November 2014 hingga Januari 2015. Gaya komunikasi Politik Joko Widodo terlihat dari statemen-statemen yang dimuat oleh Riau Pos dalam menyikapi isu-isu publik seperti kenaikan BBM, eksekusi hukuman mati terpidana narkoba hingga kasus Kriminalisasi KPK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan rumusan masalah, yakni:

1. Apa saja isu-isu kebijakan publik yang disikapi oleh Presiden Joko Widodo dalam media massa ?
2. Bagaimana gaya komunikasi politik Presiden Joko Widodo dalam menyikapi isu-isu publik melalui media massa ?

C. Kerangka Teoritis

1. Komunikasi Politik

Secara garis besar komunikasi politik diartikan setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk memperoleh pengaruh terhadap penyebaran atau penggunaan *power* (kekuasaan) di tengah masyarakat yang di dalamnya mengandung 4 (empat) bentuk komunikasi, yaitu; (a) *elite communication*, (b) *hegemonic communication*, (c) *Petitionary communication* dan (d) *assocional communication* (dalam Belli Nasution).

Komunikasi politik dapat dimaknakan sempit dan luas. Arti sempit komunikasi politik adalah setiap penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucap ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Komunikasi politik secara luas berarti setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan informasi politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan.

Gurevith dan Blummer (dalam Belli Nasution) mengemukakan 4 (empat) komponen dalam komunikasi politik, yaitu:

1. Institusi-institusi politik dalam aspek komunikasinya
2. Institusi media dalam aspek politiknya
3. Orientasi *audience* terhadap komunikasinya
4. Aspek *political culture* yang relevan dengan komunikasi.

Komunikasi juga dapat dikaitkan dengan budaya, yakni komunikasi konteks tinggi dan komunikasi konteks rendah. Komunikasi konteks tinggi apabila menggunakan bahasa bersayap, bahasa tubuh yang tidak jelas dan bahasa verbal tidak langsung *to the point*. Sedangkan komunikasi konteks rendah bermakna menggunakan bahasa yang tegas, lugas dan konkrit.

Proses komunikasi politik dimulai ketika komunikator (Presiden Joko Widodo) menyampaikan pesan politik berupa statemen-statemen kepada komunikan (elite dan khalayak masyarakat) melalui saluran media massa, salah satunya Riau Pos. Pesan tersebut kadangkala bersifat konteks tinggi dan juga konteks rendah.

2. Isu Kebijakan Publik

Isu kebijakan secara garis besar merupakan pertentangan pandangan mengenai karakter suatu permasalahan dimana terjadi silang pendapat antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh. Isu kebijakan tidak hanya memuat ketidaksepakatan mengenai arah tindakan yang aktual dan potensial tetapi juga cerminan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Isu kebijakan dapat mempunyai 4 (empat) jenjang, yakni:

- a. Isu-isu utama
- b. Isu-isu sekunder
- c. Isu-isu fungsional
- d. Isu-isu minor

Selanjutnya semakin tinggi status peringkat isu semakin strategis kedudukan/posisi isu tersebut secara politis. Peringkat sangat dipengaruhi oleh persepsi yang akhirnya akan mempengaruhi penilaian mengenai status peringkat yang terkait dengan suatu isu tertentu.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan metode ini dikarenakan peneliti ingin memperdalam kajian lebih dalam, dimana tidak sekedar hanya berhenti pada permukaan (*Verstehen*). Penelitian ini berupaya untuk melihat pelbagai fenomena di lapangan dan menggunakan teori sebagai pisau analisis sehingga terlihat kesenjangan antara realitas dan seharusnya (*dos sollen Vs dos sein*).

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat *descriptive interpretative*. Bersifat demikian karena peneliti ingin menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis terkait fenomena yang terlihat dalam kajian ini. Kemudian menganalisis dan menuangkannya melalui interpretasi yang peneliti pahami. Kemudian studi ini bersifat *library research* dengan menggunakan buku, artikel, berita dari pelbagai media massa.

2. Jenis Data

Data Sekunder

Menurut Moleong (2001:113-116), data tambahan dapat diperoleh dari sumber data tertulis, foto, dan data statistik. Adapun datanya adalah isu-isu publik yang mengemuka, statemen Joko Widodo di media massa dan respon terhadap Presiden Joko Widodo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua macam pengumpulan data secara kualitatif, yakni penelaahan terhadap dokumen tertulis.¹ Data yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi, klinis, atau program; memorandum-memorandum dan korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survei¹.

E. Hasil

¹ Bagong Suyanto dan Sutinah.2006.Metode Penelitian Sosial.Jakarta. Kencana Prenada Media Group

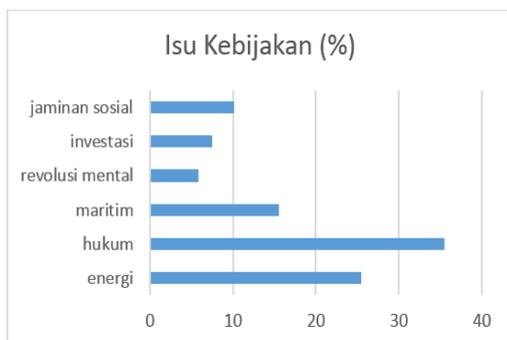
1. Isu-Isu Kebijakan Publik Pemerintahan Presiden Joko Widodo di Media Massa Portal

Penulis menganalisis isu-isu kebijakan Publik yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo melalui media portal *kompas.com*, *detik.com*, *Republika.com* dan *Viva.co.id*. Alasan menggunakan media tersebut ada 2 (dua), pertama, merupakan situs berita online *top rating*, kedua, media tersebut paling banyak *menshare* berita, artikel dan sejenisnya. Keempat media tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kubu, yakni memberitakan positif terhadap Presiden dan bersebrangan dengan Joko Widodo. Kubu pertama adalah Trans Corp dan Kompas Gramedia (*Kompas* dan *Detik*) sedangkan kubu kedua adalah Bakri and Brothers dan Mahaka Media Grup (*Viva* dan *Republika*).

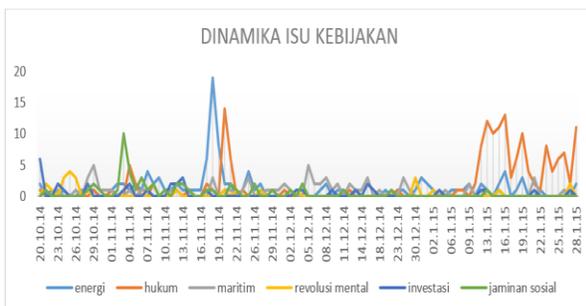
Isu-isu kebijakan publik Joko Widodo dimulai ketika penyampaian pidato pelantikan dan visi misi yang diturunkan menjadi kebijakan publik.² Isu kebijakan yang pertama terkait kemaritiman, dalam hal ini pembentukan poros maritim, kedua terkait revolusi mental, ketiga, jaminan sosial, keempat, ketersediaan dan kemandirian energi, kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pelebaran celah fiskal dan kondusifitas iklim investasi. Terakhir, penegakan hukum, diwakili oleh pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri serta kriminalisasi KPK atau kisruh KPK Vs POLRI.

Sebaran Isu Kebijakan

Keenam isu kebijakan yang telah dijelaskan diatas kemudian dijadikan sasaran isu kebijakan yang diberitakan oleh media massa portal *Kompas.com*, *Detik.com*, *Republika.com*, *Viva.co.id*. Persebaran isu kebijakan di media massa portal lebih kepada isu-isu kebijakan publik yang menimbulkan kontroversi dan laris bagi media massa karena hakekatnya *bad news is good news*.



² <http://pindai.org/2015/02/03/100-hari-jokowi-di-mata-media>. Diakses tanggal 20 Juni 2015. Pukul 10.00



Isu-isu kebijakan publik yang menjadi *trending topic* di media ketika awal pemerintahan adalah isu kebijakan investasi sedangkan isu jaminan sosial, poros maritim dan revolusi mental tidak menarik untuk dijual.

Kemudian isu-isu kebijakan yang mendapat perhatian lebih dari media adalah

- 1) Isu energi yang dioperasionalkan sebagai kebijakan terhadap BBM.
- 2) Isu kebijakan dibidang hukum. Pengangkatan KAPOLRI yang berujung pada kisruh KPK VS POLRI.

Isu-isu tersebut terpolar ke media massa portal, Viva untuk tema hukum, detik.com untuk investasi dan maritim, kompas untuk jaminan sosial dan republika untuk isu-isu energi.³

Selain isu-isu yang telah dijabarkan diatas, muncul isu kekinian di kalangan masyarakat yang diekspose oleh pelbagai media massa, seperti kinerja kabinet berujung pada *reshuffle* kabinet.⁴ Kinerja kabinet yang baik merupakan manifestasi kebijakan dari setiap Menteri melalui kementerian. Misalnya kinerja Menteri Susi dalam memberantas *illegal fishing* dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melebihi muatan dalam mengeksplorasi hasil laut tanpa izin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapat sorotan positif dari kebijakan yang dibuat Menteri Anies Baswedan, yaitu penghentian kurikulum 2013 dan penghapusan Ujian Akhir Nasional (UAN) sebagai standar kelulusan siswa.

³ Ibid.

⁴ http://www.kompasiana.com/adrian67/kilas-balik-kepemimpinan-jokowi-tahun-2014-dan-tantangan-2015_55546571b67e615b14ba54c0. Diakses tanggal 20 Juni 2015. Pukul 11.05

Disisi lain ada pula menteri yang mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Kementerian ini merupakan kementerian baru yang membawahi kementerian sosial, kementerian pendidikan dasar dan menengah dan kementerian kesehatan. Menko PMK fokus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui program Kartu Keluarga Produktif, yang mencakup Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Oleh karena itu kinerja kementerian ini hanya itu-itu saja tanpa ada terobosan lain yang fenomenal.

Tingginya sentimen negatif oleh masyarakat terhadap Puan dipicu oleh perseteruannya dengan ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Tiga kartu yang dikeluarkan Puan dikritik Yusril dan dianggap tak berlandaskan hukum. Faktor lainnya adalah sikap apatis dari masyarakat terhadap Puan yang juga cenderung tinggi. Puan dianggap sebagai menteri ‘titipan’ semata.⁵

Selain itu dapat diuraikan isu-isu berdasarkan popularitas di masyarakat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁶

1. Kenaikan Harga BBM
2. Polemik pencalonan kapolri
3. Reformasi tata kelola Migas
4. Polemik industri penerbangan
5. Gejolak nilai tukar rupiah
6. Program kompensasi kenaikan BBM
7. Penenggelaman kapal pencuri ikan
8. Pertemuan KTT APEC dan ASEAN
9. Polemik pemilihan Jaksa Agung
10. Hukuman mati kasus Narkoba
11. Rekening gendut kepala daerah
12. Penundaan penerapan kurikulum pendidikan

Pasca Reshuffle pemerintahan Jokowi -JK kembali membuat sensasi. Beberapa contoh isu-isu yang membuat heboh kembali, antara lain; Kementerian Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan penghapusan kolom agama dalam KTP karena alasan diskriminasi, padahal negara ini menganut Pancasila yang sila pertama menempatkan “Ketuhanan yang Maha Esa”, sontak mayoritas umat Islam, Menteri Agama, Ketua MUI dan ormas Islam menyatakan menolak pengosongan kolom agama di KTP. Setelah menggeling dan ditolak oleh masyarakat, Tjahjo Kumolo kemudian memperjelas bahwa kolom agama tidak akan dihapus hanya saja bagi yang beragama di luar agama resmi Indonesia, maka kolom agama tidak wajib diisi.⁷

Kedua, masih ingat isu tentang pelarangan berdoa bagi anak-anak di sekolah yang katanya menjadi gagasan Mendikbud, Anies Baswedan? Hingga ustad Yusuf Mansur angkat bicara saat itu, walaupun setelahnya dia minta maaf karena ternyata setelah tabayyun kepada Mendikbud,

⁵ *Ibid.*

⁶ Republika.co.id. Diakses tanggal 22 Juni 2015. Pukul 10.35

⁷ <http://www.suaramedan.com/2015/06/kenapa-pemerintahan-jokowi-jk-selalu.html>. Diakses tanggal 26 Agustus 2015 Pukul 10.35 WIB

Anies Baswedan membantah pelarangan itu, Anies mengatakan perkataannya dipelintir oleh media. Dan setelah klarifikasi itu, suasana kembali adem ayem.

Tak berselang lama, kembali netizen dihebohkan oleh postingan Esti Ningsih di twitternya, esti mengupload sebuah foto yang memuat larangan jilbab syar'i dalam seleksi pegawai BUMN, hal itupun ditanggapi oleh netizen sebagai tindakan diskriminasi, hingga DPR juga bereaksi terhadap isu tersebut, namun lagi-lagi setelah bola panas itu menggelinding, kementerian BUMN membantah adanya larangan tersebut, dan Esti Ningsih tersudut menjadi penyebar berita hoax, namun apakah betul hoax? Bahkan Jusuf Kalla turut berkomentar terkait hal ini, JK menilai ada pihak yang ingin menjatuhkan menteri Rini. Entahlah... ketiga isu itu dilemparkan bulan November dan Desember, bahkan usia pemerintahannya baru mencapai dua bulan.⁸

Selanjutnya penolakan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di laut oleh para TNI mendapat kecaman dari warga, panglima TNI, Moeldoko mengatakan mengurus warga Indonesia saja susah, bagaimana mau mengurus orang lain, pernyataan itu menyinggung rasa kemanusiaan. Sedang di sisi lain pemerintah memperlakukan pengungsi syiah dengan nyaman dan fasilitas yang lengkap. Setelah kebijakan itu, Wapres JK meminta kepada TNI agar tidak lagi menolak pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia.⁹

Kasus terbaru adalah "kreativitas" menteri agama saat isra' mi'raj dengan adanya tilawah langgam jawa, dengan alasan Islam di Indonesia harus punya ciri khas sendiri, tilawah langgam jawa itupun mendapat sorotan dari publik, lagi-lagi sosmed dibanjiri berita tersebut, ada yang mengecam adapula yang menerima, karena ini memang masih ikhtilaf. Walaupun akhirnya Menag minta maaf soal kegaduhan yang ditimbulkan oleh tilawah langgam jawa tersebut.¹⁰

Belum sembuh isu tilawah langgam Jawa, kembali Menag menuai kecaman, lewat twitternya Menag berkicau terkait toleransi menghormati orang yang tidak puasa dengan tetap membolehkan warung buka di siang hari selama ramadhan, Karena menuai kecaman, Menag kembali mengklarifikasi maksud dari pernyataannya tersebut.¹¹

Selanjutnya Ketua Dewan Mesjid Indonesia yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang membuat geger dengan isu pelarangan pemutaran kaset mengaji di mesjid-mesjid karena mejadi polusi udara, walaupun JK tidak mengusulkan pelarangan total, tapi mengatur waktu dan jangkauan suara mengaji tersebut, tetap saja JK mendapat kecaman dari masyarakat, bahkan tokoh-tokoh juga ikut bersuara menanggapi JK.¹²

1. Gaya Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo Dalam Menyikapi Isu-Isu Publik Melalui Media Massa

Komunikasi politik Presiden Joko Widodo dalam menyikapi isu-isu publik melalui media massa tidak optimal. Komunikasi yang dilakukan tidak terkelola dengan baik dan langsung dikomentari oleh Presiden tanpa menggunakan pola Juru Bicara (Jubir) seperti zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selanjutnya komunikasi yang dilakukan oleh Presiden seringkali berbeda bahkan tumpang tindih dengan pihak lain seperti Wakil Presiden atau para pembantunya. Salah satu contoh terjadi

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

perbedaan pandangan antara JOKOWI dengan JK atau pernyataan pendapat mengenai kenaikan BBM (Qodary dalam news.metrotvnews.com).

Para pembantu Presiden, yakni Menteri atau setingkat menteri seringkali membuat pernyataan yang menimbulkan kericuhan publik dan menampakkan kemarahan pejabat dan bersifat pribadi tanpa sepengetahuan Presiden. (Konfrontasi.com). Selain itu gaya komunikasi Jokowi seringkali menggunakan pola-pola kearifan lokal yaitu budaya arek. Budaya arek menggunakan pola komunikasi langsung kepada inti permasalahan yang menjadi isu publik. Kadang pula mengadopsi gaya mataraman.¹³

Menurut pakar komunikasi politik Evie Ariadne (dalam nasional.sindonews.com) pola komunikasi yang digunakan tanpa pola. Jokowi masih menggunakan pola komunikasi politik populis dan komunikasi relasi. Sedangkan menurut Ridho, tim komunikasi politik Jokowi harus mampu memetakan media yang mempublikasikan berita-berita istana dikarenakan setiap media mempunyai agenda tersendiri tergantung pemilik modal. Presiden harus sering melakukan konferensi pers dan para menteri. Akan tetapi bila menggunakan *door stop*. Informasi yang disampaikan akan sepotong-sepotong sehingga informasi diperoleh tidak utuh dan menimbulkan penafsiran berbeda oleh setiap media.¹⁴

Semenjak tahun 2015 untuk mereduksi distorsi informasi publik, Presiden Jokowi membentuk tim komunikasi politik yang berfungsi untuk menyampaikan pikirannya ke publik dalam konteks komunikasi politik. Tim tersebut diisi oleh Sukardi Rinakit dan Teten Masduki. Kedua orang ini bertugas menjelaskan segala persoalan yang disampaikan kepada publik agar menjadi jelas dan rinci.¹⁵

Tim tersebut mempunyai beberapa tantangan dalam pengelolaan informasi kepada publik. Menurut andrianto (dalam suarakarya.id) ada 3 (tiga) tantangan yakni:

- Pertama, tim komunikasi presiden harus dapat mengelola informasi yang disebarkan ke masyarakat terkait kebijakan presiden, wapres, dan segenap menteri yang menyangkut kepentingan publik.
- Kedua, tim komunikasi presiden tidak bekerja dalam kerangka pikir hanya menyebarkan pesan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan pembantunya kepada publik. Pesan-pesan kuat dan menarik dimiliki para pemimpin harus dapat menjadi daya tarik bagi media massa dan publik. Tentu yang dinilai di sini adalah kinerja pemimpin prorakyat bukan sekadar strategi imagery atau pencitraan pemimpin di mata rakyat.
- Ketiga, ujian bagi tim komunikasi presiden untuk dapat merangkul kekuatan media massa. Siapa pun tahu media massa memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan massa. Dengan jangkauan luas, media membentuk dan mempengaruhi kesadaran masa yang dapat mempengaruhi roda pemerintahan.

Menurut Makmur Gazali strategi komunikasi politik yang digunakan kabinet kerja berupa komunikasi politik “megaphone”. Komunikasi politik megaphone berarti bahwa intensitas

¹³ Kabar24bisnis.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2015. Pukul 12.05 WIB.

¹⁴ Nasional.sindonews.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2015 pukul 12.25 WIB.

¹⁵ <http://staging.monitorday.com/detail/4492/mencegah-distorsi-informasi-publik>. Diakses hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 08.32.

komunikasi politik pemerintahan Jokowi-Kalla ini berada pada level sangat nyaring serta mencerminkan sebuah semangat untuk melakukan interaksi pada sasaran komunikasi yakni publik.¹⁶

Salah satu contoh menarik untuk di cermati adalah peragaan model komunikasi megaphone jajaran kementerian pada kabinet kerja Jokowi-JK dalam membangun serta memperkuat identitas kementerian masing-masing. Lembaga kementerian yang paling nampak atau menonjol diantara pelbagai kementerian yakni kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Kementerian BUMN serta kementerian Perhubungan.¹⁷

Komunikasi politik megaphone dipertontonkan sangat dominan oleh kementerian/lembaga Isu-isu kebijakan yang muncul selalu menimbulkan reaksi baik respon positif ataupun respon negatif dari publik. Hal tersebut merupakan dampak dari gaya komunikasi politik yang menjadi pilihan karena menimbulkan dua sisi mata uang secara bersamaan.¹⁸

Sisi pertama, komunikasi politik *megaphone* seperti ini mampu lantang serta menjadi “lem” komunikasi yang *intens* antara pemerintah dan publik. Gaya komunikasi ini pada tataran tertentu memang dapat menghadirkan *ghirah* partisipatif kuat pada publik. Pemberian unsur kepentingan yang berujung pada emosional pada setiap isu-isu kebijakan dan menjadi musuh bersama bagi publik.

Disisi lain, model tersebut juga menunjukkan elemen pencitraan yang kuat. model komunikasi yang terbangun memang memiliki “pemompa impian” dan menjadikan media massa sebagai instrumen kekuatan komunikasi. Akan tetapi bila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, maka akan terjebak dalam dimensi *artifisial* pencitraan semata dan tidak tertutup kemungkinan akan terperangkap pada *banalisme* komunikasi.¹⁹ Banalisme menurut kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan paham tentang ketidak elokkan, kasar. Sedangkan banalisme komunikasi adalah pola komunikasi yang menggunakan kata-kata tidak elok. Selanjutnya dari perspektif komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang digunakan Presiden Jokowi adalah *low context communication* (komunikasi konteks rendah). Komunikasi konteks rendah adalah bentuk komunikasi langsung, tanpa *tedeng aling-aling*. Setiap ucapan yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo tidak menggunakan kata-kata atau kalimat bersayap, tidak ada penafsiran ganda terhadap setiap kalimat yang terlontar. Kalimat tersebut bermakna tunggal dan tidak menimbulkan interpretasi subyektif pendengarnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari sehingga dapat dengan mudah dipahami khalayak umum masyarakat.²⁰

¹⁶ http://makmurgazaliviruskata.blogspot.com/2015_01_01_archive.html. Diakses tanggal 24 Agustus 2015 pukul 09.50 WIB.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ <http://choiumayah.blogspot.com/2014/11/model-komunikasi-jokowi-dengan-menteri.html>. Diakses tanggal 24 Agustus 2015 pukul 10.45 WIB.

Kemudian dari konteks komunikasi kepresidenan ada perbedaan antara Presiden Jokowi dengan periode sebelumnya. Menurut Prof. Mudjia Rahardjo komunikasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jauh dari standar komunikasi seorang Presiden selama ini.

Presiden Jokowi seringkali memakai baju putih lengan panjang dan dilipat di bagian ujungnya, penggunaan komunikasi dengan pilihan kosa kata membumi, bahasa santai dan tidak formal, dingin, bahasa tubuhnya yang digunakan sering tidak sama antara kata atau kalimat yang diucapkan, atau kalimat yang tidak terstruktur, dan sering kali berhenti dengan kalimat yang belum selesai.²¹

“....Sejak menjadi Gubernur DKI saya beberapa kali mendapatkan Jokowi suka sekali mengucapkan kalimat dengan “baik....” yang mestinya dilanjutkan dengan kata “maupun...”. Misalnya, usai pelantikan dan berorasi di depan massa pendukungnya, Jokowi mengucapkan kalimat “Saya akan bekerja ‘baik’ dengan petani, nelayan, pegawai negeri, pegawai swasta, tentara, polri, pedagang, mahasiswa, dan lain-lainnya”. Kalimat itu belum lengkap. Penggunaan kata “baik...” mestinya diikuti dengan kata “maupun...”.²²

Sebagai contoh saat ini baju warna putih lengan panjang laris di pasaran. Tidak hanya itu, banyak orang yang meniru cara berpakaian Jokowi, baju putih dibiarkan tanpa dimasukkan ke celana. Menurut berita yang saya baca, sekarang pedagang baju jas sepi pembeli, karena masyarakat meniru pemimpinnya. Dimulai saat pelantikan Kabinet Jokowi yang semua menteri mengenakan pakaian putih, jarang sekali kita melihat pejabat negara mengenakan pakaian jas berdasi.²³

Contoh lain Ketika memberi penjelasan mengenai persetujuan Polri dan KPK, usai penangkapan BW oleh Polri, publik mengharap Jokowi bisa menjelaskan persoalan kemelut itu dengan gamblang. Tetapi yang terjadi Jokowi hanya memberikan penjelasan singkat, tidak lebih dari 3 menit, dengan isinya yang sangat normatif sekedar himbauan agar kedua institusi penegak hukum itu tidak saling menyerang. Tak pelak banyak yang kecewa dengan sikap Jokowi tersebut. Menyikapi persoalan persetujuan antara Polri dan KPK, sebagai kepala negara dan pemerintahan seharusnya Jokowi bisa berbicara tidak sesingkat itu sehingga terkesan Jokowi tidak menguasai persoalan kenegaraan. Para pendampingnya mestinya bisa menyampaikan saat mana Jokowi harus bicara singkat dan saat mana pula harus panjang lebar untuk menunjukkan kenegarawanannya agar rakyat yang telah memilihnya tidak kecewa.²⁴

F. PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Isu-isu kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi diklasifikasikan menjadi 2, yaitu menjadi *tranding topic* di pelbagai media online dan mempunyai popularitas tinggi di masyarakat. Sebaran isu-isu kebijakan pada media massa dan portal lebih kepada kebijakan publik yang menimbulkan kontroversi di masyarakat karena menjadi salah satu

²¹<http://www.uinmalang.ac.id/r/150201/komunikasi-politik-jokowi-versus-sby.html>. Diakses tanggal 24 Agustus 2015 pukul 11.24 WIB.

²² Petikan dari artikel Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

komoditas berita. Sedangkan yang populer di masyarakat adalah persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain, dimana nampak nyata dan dirasakan oleh khalayak umum tanpa perlu adanya analisa mendalam.

2. Gaya komunikasi Presiden Jokowi menggunakan pola *low context communication* ketika memberikan informasi kepada masyarakat menyesuaikan kultur budaya masyarakat setempat. Namun seringkali informasi yang disampaikan berbeda dengan para pembantunya, yakni para menteri atau pejabat setingkat menteri bahkan pejabat eselon I kementerian sehingga menimbulkan kegaduhan. Hal ini mengakibatkan pengelolaan komunikasi politik Presiden menjadi buruk. Oleh karena itu membentuk tim komunikasi politik untuk mereduksi persoalan tersebut. Gaya komunikasi tersebut di satu sisi membuat tingkat partisipasi masyarakat meningkat tetapi disisi lain memunculkan pencitraan semata.

Daftar Pustaka

Buku

Comstock, George & Scharrer, Erica. 2005. *The Psychology of Media and Politics*. California: Elsevier Academic Press.

Denzin, K. Norman dan Lincoln, S. Yvonna. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Kaid, Linda Lee. 2004. *Handbook of Political Communication Research*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Lesmana, Tjipta.2008.*Dari Soekarno sampai SBY:Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa*.Jakarta;PT Gramedia Pustaka

Louw, Eric. *The Media and Political Process*. London: Sage Publications

Artikel

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si.2015 *Komunikasi Politik Jokowi Versus SBY*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jurnal

Jurnal Observasi.Vol.7. No.2.2009.Drs. Ramon Kaban.M.Si.*Komunikasi Politik RI:Dari Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono*

Internet

<http://pindai.org/2015/02/03/100-hari-jokowi-di-mata-media>. Diakses tanggal 20 Juni 2015. Pukul 10.00

http://www.kompasiana.com/adrian67/kilas-balik-kepemimpinan-jokowi-tahun-2014-dan-tantangan-2015_55546571b67e615b14ba54c0. Diakses tanggal 20 Juni 2015. Pukul 11.05

Republika.co.id. Diakses tanggal 22 Juni 2015. Pukul 10.35

<http://www.suaramedan.com/2015/06/kenapa-pemerintahan-jokowi-jk-selalu.html>. Diakses tanggal 26 Agustus 2015 Pukul 10.35 WIB

Kabar24bisnis.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2015. Pukul 12.05 WIB.

Nasional.sindonews.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2015 pukul 12.25 WIB.

<http://staging.monitorday.com/detail/4492/mencegah-distorsi-informasi-publik>. Diakses hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 08.32.

http://makmurgazaliviruskata.blogspot.com/2015_01_01_archive.html. Diakses tanggal 24 Agustus 2015 pukul 09.50 WIB.

<http://choiumayah.blogspot.com/2014/11/model-komunikasi-jokowi-dengan-menteri.html>. Diakses tanggal 24 Agustus 2015 pukul 10.45 WIB.

<http://www.uinmalang.ac.id/r/150201/komunikasi-politik-jokowi-versus-sby.html>. Diakses tanggal 24 Agustus 2015 pukul 11.24 WIB.